

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN (Kajian tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu)

Sustainable Development of Agro-cultural (Studies on Organic Agricultural Development in Batu City)

Inneke Meilia Fadlina^{1,2}, Bambang Supriyono^{1,3}, Saleh Soeaidy^{1,3}

¹Program Magister Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

²Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

³Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Abstrak

Penerapan pertanian konvensional menunjukkan dampak negatif pada perilaku, pendapatan petani serta kualitas lingkungan. Hal ini memacu pergeseran paradigma pembangunan pertanian ke arah pembangunan pertanian berkelanjutan. Pengembangan pertanian organik merupakan perwujudan nyata dari upaya pemerintah Kota Batu, Propinsi Jawa Timur untuk menerapkan pembangunan pertanian berkelanjutan. Upaya pembangunan tidak lepas dari perencanaan sebagai proses awal dari pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: 1) perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu; 2) strategi untuk mewujudkan keberlanjutan perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu; 3) stakeholder dalam perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu; 4) faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal, yaitu: 1) perencanaan dilakukan dengan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, serta top down dan bottom up planning yang penerapannya disesuaikan dengan konteks perencanaan. Teknis perencanaan dan pelaksanaan dilakukan melalui koordinasi antar bidang dan antar anggota panitia pelaksana teknis; 2) belum ada keterpaduan antar sektor yang terkait pada kawasan pertanian organik di Kota Batu; 3) stakeholder yang terlibat meliputi unsur pemerintah, perguruan tinggi, praktisi dan petani. Masih ada stakeholder yang belum dilibatkan dalam perencanaan; 4) faktor pendukung diantaranya potensi SDA, dukungan sosial kemasyarakatan, dan pendukung lainnya seperti media massa. Faktor penghambat meliputi kendala teknis di lapangan; pola pikir petani yang cenderung konvensional; serta kendala administrasi.

Kata kunci: kawasan, keberlanjutan, organik, perencanaan, *stakeholder*.

Abstract

The application of conventional agriculture show a negative impact on behavior, farmers' income and environmental quality. This spurred a paradigm shift in agricultural development towards sustainable agricultural development. The development of organic farming is a real manifestation of the government's efforts in Batu, East Java to implement sustainable agricultural development. Development efforts can not be separated from planning as the beginning of the implementation of the development process. This study aims to describe and analyze: 1) planning development of organic farming in Batu, 2) Sustainability planning strategies to realize the development of organic farming in Batu, 3) stakeholders in the planning of the development of organic farming in Batu, 4) supporting factors and inhibiting in planning development of organic farming in Batu. The results showed a few things, namely: 1) planning approach with political, technocratic, participatory, and top down and bottom up planning tailored to the context of the implementation plan. Technical planning and implementation were run through coordination between the field and among the members of the technical committee; 2) there is no integration between the sectors related to organic farming in Batu; 3) stakeholders involved include the government, universities, practitioners and farmers. There are still stakeholders who have not been involved in planning; 4)

Alamat korespondensi:

Inneke Meilia Fadlina

Email : inn_mf@gmail.com

Alamat : Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kota Batu

supporting factors such as the potential of natural resources, social support, and other support such as the mass media. Inhibiting factors include technical problems in the field; farmer's mindset tend to be conventional, as well as administrative constraints.

Keywords: cluster, organic, planning, stakeholder, sustainability.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan pertanian pada sekitar empat dasa warsa ter-akhir secara pasti telah memberikan dampak negatif pada perilaku dan penda-patan petani serta kualitas lingkungan sehingga menuntut pergeseran paradigma pembangunan pertanian ke arah pemba-ngunan pertanian berkelanjutan.

Pada dasarnya pembangunan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani secara luas. Hal ini dilakukan melalui peningkatan produksi pertanian (kuantitas dan kualitas), dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Pembangunan pertanian dilakukan secara seimbang dan disesuaikan dengan daya dukung ekosistem sehingga kontinuitas produksi dapat dipertahankan dalam jangka panjang, dengan menekan tingkat kerusakan lingkungan sekecil mungkin. Adigium sistem pertanian berkelanjutan antara lain *better environment, better farming, and better living*. Adapun perta-nian organik merupakan salah satu model perwujudan sistem pertanian berkelanjutan (Salikin, 2003: 15-16).

Produk hortikultura yang merupakan unggulan Kota Batu harus mampu bertahan sebagai ciri khas daerah, sehingga peningkatan daya saing melalui perbaikan kualitas dan kuantitas menjadi suatu keharusan. Untuk mendukung program pengembangan menuju pertanian organik secara nasional serta sebagai upaya pemecahan masalah terkait isu-isu strategis yang berkembang seperti degradasi kualitas tanah pada lahan pertanian dan tingginya pemakaian pestisida di Kota Batu, maka kebijakan pembangunan pertanian baik tanaman pangan maupun hortikultura di Kota Batu diarahkan me-nuju pada penerapan sistem pertanian organik (*go organic*).

Setiap upaya pembangunan termasuk pengembangan pertanian organik memerlukan rencana sebagai acuan pelaksanaan pembangunan. Tjokroamidjojo (1995: 31-33) menjelaskan bahwa proses pembangunan secara berencana

tidak selalu harus menggunakan suatu rencana formil. Namun demikian, suatu perencanaan yang baik akan sangat membantu suatu pembangunan berencana. Perkembangan dalam praktek dan ilmu perencanaan menyatakan bahwa proses perencanaan itu sendiri harus terdiri dari formulasi rencana dan implementasi-nya. Penjelasan tersebut menekankan penting-nya suatu dokumen rencana yang mampu menje-laskan secara gamblang tujuan, bagaimana, kapan dan oleh siapa rencana tersebut dilaksanakan. Karena itu dalam perencanaan pembangunan penting untuk memperhatikan proses penyusunan ren-cana itu sendiri, aktor /*stakeholder* yang terlibat, strategi yang digunakan, serta berbagai hal yang dapat mendukung maupun menghambat upaya perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya.

Realita yang terjadi di Kota Batu adalah upaya menuju pengembangan pertanian organik sebagai wujud nyata pemerintah Kota Batu dalam rangka pembangunan pertanian berkelan-jutan tertuang sebagai kebijakan pembangunan bidang pertanian pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Tahun 2007-2012, namun rencana aksi pertanian organik sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman teknis dan peta jalan dalam pelaksanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu sampai penelitian ini dilakukan belum ada. Adapun berba-gai bentuk kegiatan yang terkait dengan upaya pengem-bangan pertanian organik di Kota Batu mulai gencar dilakukan sekitar tiga tahun terakhir.

Berdasarkan permasalahan dan hal-hal penting terkait dengan perencanaan pemba-ngunan sebagaimana telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti topik perencanaan pembangunan pertanian berkelanjutan yang dalam penelitian ini dikaji melalui perencanaan pengem-bangan pertanian organik di Kota Batu.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi-kan dan menganalisis: 1) perencanaan pengem-bangan pertanian organik di Kota Batu; 2) strategi untuk mewujudkan keberlanjutan perencana-an pengembangan pertanian organik di Kota Batu; 3) stakeholder dalam perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu;

4) faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Kota Batu, Jawa Timur. Data yang digunakan berupa data primer melalui wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder yang diperoleh melalui penelaahan dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.

Untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait fokus penelitian maka informan ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*) pada tahap awal dan dalam pengembangannya dilakukan *snow ball*, artinya setelah memasuki lapangan penelitian, peneliti menghubungi informan tertentu untuk meminta keterangan, kemudian akan terus berkembang ke informan lainnya yang terkait dengan fokus penelitian sampai diperoleh data dan informasi yang lengkap dan menunjukkan tingkat kejenuhan informasi. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 27 orang terdiri dari unsur Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu meliputi pejabat struktural, staf dan PPL; aparat desa di lokasi kawasan organik; petani; kelompok tani; ketua gabungan kelompok tani; pengusaha dan praktisi pertanian organik di Kota Batu.

Data sekunder bersifat melengkapi data primer, diperoleh dengan mengumpulkan sumber tertulis atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Tahun 2007-2012, Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Tahun 2011, Batu Dalam Angka Tahun 2011, Jadwal Rencana Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Pertanian organik Tahun 2011, Surat Keputusan tentang Panitia Pelaksana Teknis Pengembangan Kawasan Pertanian Organik, Berita Acara Sosialisasi Pengembangan Kawasan Pertanian Organik.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif dari Miles and Huberman (1992:20), yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu

Perencanaan pengembangan pertanian organik didasari oleh adanya permasalahan penurunan daya dukung tanah pada lahan

pertanian serta tingginya tingkat pemakaian pestisida oleh petani yang ditunjukkan oleh tingkat residu pestisida pada tanah dan produk hortikultura. Didukung oleh potensi SDA dan SDM yang dimiliki, maka dirancang upaya pengembangan pertanian organik dengan menentukan strategi yang berpijak pada permasalahan serta kondisi tujuan yang diharapkan, yaitu mewujudkan pertanian organik dengan konsep agrowisata di Kota Batu. Dengan demikian dalam kegiatan perencanaan perlu memahami kondisi wilayah perencanaan meliputi permasalahan dan potensi yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan pendapat Riyadi dan Deddy (2002: 69-70) bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang kondisi wilayah perencanaan, baik berupa potensi dan masalah bermanfaat dalam menentukan pilihan strategi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah perencanaan serta berpengaruh pula guna memperlancar pelaksanaannya.

Upaya memahami kondisi wilayah perencanaan atau yang disebut juga sebagai kegiatan tinjauan keadaan dilakukan oleh pemerintah Kota Batu melalui pengamatan lapangan oleh PPL berkoordinasi dengan bidang teknis, kegiatan penelitian berupa pengujian/analisa laboratorium terhadap kualitas tanah dan residu pestisida pada produk hortikultura, serta mengkaji data statistik pertanian. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas melalui kajian secara ilmiah tentang kondisi tanah dan kualitas produk hortikultura yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1987: 75-76) bahwa kegiatan tinjauan keadaan, masalah dan potensi memerlukan sekali bahan-bahan statistik dan hasil-hasil penelitian. Melalui kegiatan penelitian dan analisa data statistik yang akurat akan diperoleh informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kondisi wilayah perencanaan. Hal ini penting sebagai dasar untuk menentukan tujuan dan menyusun strategi pencapaian tujuan tersebut.

Strategi yang digunakan dalam rencana pengembangan pertanian organik oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu pada intinya adalah memasyarakatkan penerapan cara bertani yang mengarah pada penerapan pertanian organik serta menginisiasi pembentukan kawasan organik sebagai *pilot project*. Pemilihan strategi tersebut mengacu pada tujuan yang ingin dicapai yaitu merubah cara berpikir masyarakat petani di Kota Batu dari pertanian konvensional (anorganik) menuju ke pertanian organik. Dengan

memasyarakatkan pertanian organik kepada petani diharapkan secara bertahap dapat membantu mengembalikan kualitas lahan pertanian sehingga mampu memberikan hasil yang lebih baik, meningkatkan nilai jual produk, memberikan keuntungan kepada petani karena biaya usaha tani rendah. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai tujuan berikutnya yaitu peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan petani, serta menarik wisatawan untuk mendukung arah pembangunan Kota Batu sebagai kota wisata berbasis pertanian. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang saling terkait antara permasalahan, tujuan dan pemilihan strategi sesuai dengan pendapat Tjokroamidjojo (1987: 62) dan Abe (2005: 82) bahwa perumusan tujuan perencanaan pembangunan merupakan prasyarat bagi penentuan strategi yang baik.

Secara keseluruhan perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu mengarah pada tiga tahap pembangunan. Tahap jangka pendek ditujukan untuk merealisasikan upaya sosialisasi penerapan pertanian menuju organik; jangka menengah bertujuan memperbaiki kondisi tanah pada lahan pertanian dan jangka panjang untuk mewujudkan kawasan pertanian organik yang mengarah pada konsep agrowisata. Namun belum diketahui secara pasti mengenai rentang waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam masing-masing tahap. Akibatnya rangkaian kegiatan yang dilakukan bersifat parsial, tidak jelas klasifikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam batas waktu tertentu. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan konsep ruang dan waktu yang disampaikan oleh Riyadi dan Deddy (2004: 13-14) bahwa perencanaan pembangunan sebagai tahapan dalam proses pembangunan memiliki keterkaitan dengan tahapan berikutnya sehingga membutuhkan *timing* yang tepat.

Perencanaan pertanian organik di Kota Batu belum memenuhi tahap perencanaan yang dikemukakan oleh Kunarjo (2002:71). Ada beberapa hal penting yang tidak dilakukan seperti penjabaran kebijakan makro ke dalam program kegiatan yang lebih rinci, karena belum disusun dokumen perencanaan strategis untuk pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Perencanaan yang dilakukan hanya mengacu pada kebijakan umum mengenai penerapan pertanian organik ramah lingkungan pada Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Tahun 2007-2012. Renstra tersebut belum menjabarkan secara rinci mengenai rencana

pengembangan pertanian organik. Dengan demikian tidak diketahui pedoman yang jelas serta rincian program kegiatan sebagai rangkaian upaya dan panduan untuk mewujudkan pertanian organik di Kota Batu. Pengembangan pertanian organik membutuhkan proses yang panjang terkait dengan berbagai kompleksitas komponen pendukungnya baik dari pelaksana, kegiatan pendukung, dan keberlanjutannya sehingga membutuhkan pola dasar pembangunan jangka panjang yang memungkinkan untuk dijabarkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek agar lebih terarah sesuai dengan ciri logis dan strategis dari perencanaan pembangunan daerah yang disampaikan oleh Syafrudin, (1993:47).

Pada tahun 2011 dirintis upaya pengembangan pertanian organik yang lebih terkonsentrasi pada beberapa kawasan, dengan sumber dana APBD II melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan: Kegiatan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan/Hortikultura Organik. Dalam kegiatan tersebut prioritas kawasan organik yang dibentuk adalah untuk sayuran dan padi. Selanjutnya prioritas pengembangan pertanian organik diarahkan pada masyarakat di lokasi kawasan organik. Namun demikian kepentingan masyarakat di luar kawasan tetap diperhatikan dan berusaha diakomodir melalui program kegiatan lain. Kebutuhan di lokasi kawasan yang tidak dapat atau belum dialokasikan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan: Kegiatan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan/Hortikultura Organik juga diupayakan untuk dipenuhi oleh program kegiatan lain, baik dari sumber dana APBD maupun APBN. Misalnya kebutuhan penyediaan prasarana pertanian seperti rumah kompos, alat pengolah pupuk organik, pembangunan jaringan irigasi dan jalan usaha tani dipenuhi oleh seksi prasarana pertanian pada bidang TPHP; bantuan ternak dipenuhi oleh bidang peternakan, dan sebagainya. Pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan tersebut mendukung pendapat Tjokroamidjojo (1987: 12) dan Conyers (1990: 5) bahwa perencanaan memungkinkan untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sumber daya yang dimaksud mencakup apapun yang dianggap oleh pembuat keputusan sebagai potensi dapat digunakan untuk mencapai tujuan, dalam hal ini termasuk pula sumber dana pembangunan.

Secara keseluruhan perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu dilakukan melalui pendekatan politis, teknokratis, partisipasi serta *top down* dan *bottom up*. Masing-masing pendekatan dilakukan sesuai dengan konteks perencanaan sebagai berikut:

1) Pendekatan politis terkait dengan ide awal perencanaan yang mengacu pada visi dan misi kepala daerah terpilih, serta dukungan kepala daerah terhadap pelaksanaan rencana. Walikota Batu yang terpilih untuk masa jabatan 2007-2012 mengusung visi Kota Batu sebagai sentra pariwisata berbasis pertanian. Visi tersebut memberi mandat bagi Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk mampu merencanakan pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki dalam suatu kerangka pembangunan pertanian yang kreatif dan mampu bersinergi untuk mendukung pariwisata di Kota Batu. Perkembangan selanjutnya, pendekatan politik semakin menguatkan untuk dilaksanakannya pengembangan pertanian organik di Kota Batu, yaitu dengan disosialisasikannya slogan "Batu Go Organik" oleh Walikota Batu pada tahun 2011. Karenanya pada tahun 2011 Dinas Pertanian dan Kehutanan bekerja keras untuk dapat merealisasikan rintisan kawasan pertanian organik di empat desa se-Kota Batu. Saat penelitian ini dilaksanakan, di Kota Batu sedang berlangsung proses pemilihan kepala daerah untuk periode tahun 2012-2017. Visi pembangunan yang disampaikan oleh calon *incumbent* adalah "Mewujudkan Kota Batu sebagai sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional", dengan demikian semakin menguatkan untuk dilaksanakannya pertanian organik di Kota Batu. Hal ini sesuai dengan pendapat Tjokroamidjojo (1995: 54), bahwa aspek politik terkait pula dengan komitmen elit kekuasaan demi terjaminnya terlaksana proses pembangunan.

2) pendekatan teknokratis berperan dalam teknis dan substansi perencanaan pada rencana pengembangan kawasan pertanian organik. Proses perencanaan tersebut dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dengan melibatkan pihak-pihak yang paham/berkompeten di bidang pertanian organik meliputi akademisi yaitu fakultas pertanian Universitas Brawijaya dan praktisi pertanian organik di Kota Batu (PT. Herbal Estate dan Ketua Gapoktan Vegory). Dengan demikian hal ini sesuai dengan pendapat Tjokroamidjojo (1995:14), Muluk (2007:13), Faludi (1992:7-8), bahwa substansi perumusan kebijaksanaan atau

program pembangunan menjadi wilayah disiplin ilmu lain untuk mengolah dan menganalisisnya, dalam hal ini ilmu pertanian.

3) Gabungan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dilaksanakan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan mensinkronkan program kegiatan dari tingkat pusat yang dapat mendukung upaya pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Diharapkan melalui usulan alokasi bantuan oleh pemerintah di daerah dalam hal ini Dinas pertanian dan Kehutanan Kota Batu dapat mengakomodir kebutuhan sesuai kondisi permasalahan, potensi dan sumber daya yang dimiliki. Hal ini mendukung pendapat Kuncoro (2004: 58) bahwa pelaksanaan perencanaan secara *top down* dan *bottom up* akan menjamin keseimbangan prioritas nasional dengan aspirasi lokal dalam perencanaan pembangunan daerah.

4) pendekatan partisipatif berperan dalam menjangkau aspirasi dari *stakeholder* sebagai dasar perencanaan teknokratis, serta untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat bagi terlaksananya rencana yang disusun. Hal ini sesuai dengan pendapat Conyers (1992:154) bahwa pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan adalah: 1) untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya maka program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; 2) meningkatkan kepercayaan masyarakat pada program atau proyek pembangunan yang akan dilaksanakan karena mereka mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; 3) bahwa partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat. Aspirasi masyarakat diperoleh secara langsung dalam sosialisasi kegiatan pengembangan kawasan pertanian organik, juga secara tidak langsung melalui hasil-hasil musrenbang dan usulan PPL. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Abe (2005: 91) bahwa partisipasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Strategi untuk mewujudkan keberlanjutan perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu

Dalam rangka mewujudkan keberlanjutan rencana pengembangan pertanian organik, pihak Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu menerapkan strategi membentuk kawasan pertanian organik yang dirintis pada tahun 2011. Kegiatan dilaksanakan dengan sumber dana

APBD II melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan: Kegiatan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan/Hortikultura Organik. Dalam kegiatan tersebut prioritas kawasan organik yang dibentuk adalah untuk sayuran dan padi. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan berupa fasilitasi sarana produksi yang meliputi bibit, pupuk dan pestisida organik, serta pendampingan petani.

Konsep kawasan dipilih sebagai strategi pengembangan pertanian organik di Kota Batu karena pola pertanian berbasis kawasan berpotensi pada kecukupan pemenuhan permintaan pasar, memudahkan pengawasan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), serta memberikan peluang bagi komoditas potensial di kawasan tersebut untuk ditangani secara proporsional. Melalui konsep kawasan diharapkan pula terjadi pergerakan aktivitas dari berbagai kegiatan lintas sektor sehingga mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Kementerian Pertanian (2011) yang mendefinisikan kawasan pertanian organik sebagai suatu ruang geografis yang delimitasi oleh batas imajiner ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha berbasis pertanian organik mulai dari penyediaan sarana produksi budidaya, penanganan pasca panen, dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukungnya.

Adapun kawasan pertanian organik yang dibentuk di Kota Batu adalah sebagai berikut:

1. Kawasan sayur organik Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji, seluas 15 ha, dengan komoditas yang dikembangkan antara lain kentang, wortel dan sawi putih
2. Kawasan sayur organik Desa Sumberejo Kecamatan Batu, luas kawasan 10 ha dengan komoditas yang dikembangkan seledri, brokoli, cabe dan tomat
3. Kawasan sayur organik Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo, luas kawasan 10 ha, dengan komoditas bawang merah, kembang kol, bawang daun dan jagung manis
4. Kawasan padi organik Desa Pendem Kecamatan Junrejo, luas kawasan 10 ha

Kawasan organik dalam konteks perencanaan pembangunan merupakan salah satu bentuk perencanaan wilayah. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan potensi SDA, SDM, teknologi, dan letak geografis dari wilayah strategis untuk pengembangan pertanian organik. Daerah yang dijadikan kawasan termasuk dalam jenis daerah

strategis karena memiliki potensi pendukung sebagai daerah penghasil komoditas sayur unggulan, infrastruktur yang memadai berupa jalan usaha tani dan jaringan irigasi yang memadai, serta sering dijadikan tujuan pedagang sebagai pemasok sayur. Dengan demikian daerah yang ditentukan sebagai kawasan sesuai dengan kategori daerah perencanaan strategis yang dikemukakan oleh Syafrudin (1993: 45). Dalam hal ini kawasan organik merupakan kawasan dimana komoditas pertanian organik berfungsi sebagai faktor penggerak utama kawasan.

Kawasan organik tersebut membutuhkan dukungan berbagai sektor sehingga pada prosesnya membutuhkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk mendukung eksistensi kawasan melalui pengembangan berbagai komponen pendukungnya meliputi sektor perdagangan, industri kecil pengolahan hasil pertanian, serta infrastruktur pendukung. Hal ini membuka pula peluang kerjasama antar daerah untuk saling mendukung demi memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari keberadaan kawasan pertanian organik. Dengan kata lain keterpaduan lintas sektor dalam perencanaan wilayah diperlukan dalam pengembangan kawasan pertanian organik sebagai salah satu bentuk upaya dan strategi perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Hal ini sesuai dengan pendapat Iryanto (2006: 94-96) bahwa paduan antara pendekatan wilayah dan pendekatan sektoral sangat penting karena masing-masing mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan suatu pembangunan.

Pembentukan kawasan pertanian organik di Kota Batu disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Pembentukan kawasan dilakukan pada lokasi yang memiliki potensi sebagai penghasil sayur, dengan jenis komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat setempat dan memiliki nilai ekonomis tinggi (unggulan). Hal ini diharapkan mampu menginisiasi minat petani untuk melaksanakan dan melanjutkan kegiatan secara mandiri. Pemilihan komoditas bernilai ekonomis tinggi untuk pengembangan pertanian organik tersebut sesuai dengan hasil penelitian Naik dan Nagadevara (2010), bahwa pengembangan pertanian organik diprioritaskan pada komoditas yang banyak dibudidayakan masyarakat setempat dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Selain itu melalui pemilihan komoditas unggulan diharapkan upaya pembangunan dapat tepat sasaran dan alokasi

dana yang telah dikeluarkan memberi hasil pembangunan yang nyata berupa peningkatan produksi baik dari segi kualitas dan kuantitas produk unggulan.

2). Kegiatan yang dilaksanakan pada dasarnya adalah demoplot dengan pelaksana adalah petani. Adapun pihak dinas berperan sebagai fasilitator yang mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana produksi organik. Hal ini dimaksudkan agar petani dapat belajar dan memahami dengan baik teknologi pertanian organik karena menerapkan secara langsung. Dengan demikian secara perlahan namun pasti kemandirian petani dapat terbentuk dan diharapkan banyak memunculkan inovasi spesifik lokasi di tingkat petani terkait teknologi organik yang sesuai dengan kondisi pertanamannya. Pelaksanaan demoplot ini merupakan salah satu teknis transfer teknologi dalam rangka meningkatkan SDM petani yang merupakan salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan sebagaimana disampaikan oleh Hidayat (2007: 49) dan Sugito (2002: 8). Peningkatan kualitas SDM diharapkan mampu memacu tumbuhnya inisiatif kreatif dari masyarakat petani sehingga kelangsungan pembangunan itu dapat dipertahankan.

3). Upaya perubahan pola pikir menuju organik dilakukan melalui pelaksanaan penyuluhan, pendampingan, dan sekolah lapang petani selama pelaksanaan kegiatan. Pendampingan dilakukan untuk memfasilitasi jika ada ketidakpahaman atau ditemukan masalah di lapang agar segera dapat diberikan solusi. Pola pikir yang benar tentang konsep pertanian organik, yaitu pemahaman terhadap empat prinsip pertanian organik merupakan hal dasar bagi suksesnya upaya penerapan pertanian organik. Berbagai usaha yang dilakukan tanpa didukung pemahaman dan perubahan pola pikir petani berpotensi pada kegagalan upaya penerapan pertanian organik oleh petani. Hal ini seperti dijelaskan oleh Agustina et.al (2002: viii) bahwa penerapan pertanian organik dihadapkan pada tantangan yang cukup besar karena memutar pola pikir dalam pembangunan pertanian.

4). Teknologi peralihan konversi pertanian dari konvensional menuju organik ditempuh melalui penerapan GAP (*Good Agricultural P*, memperbanyak penggunaan bahan organik (pupuk dan pestisida), dan pengenalan teknologi organik (penggunaan dan pembuatan secara mandiri oleh petani). Peralihan atau konversi ke arah organik sulit dilakukan dalam rentang waktu

singkat karena terkait dengan biaya, dan pemahaman yang kurang mengenai konsep dasar pertanian organik. Maka cara yang dapat ditempuh adalah melakukan konversi secara bertahap melalui metode GAP. Hal ini sesuai dengan penjelasan Sutanto (2006: 203) dan Prihandarini (2002: 65) bahwa pada tahap awal pemasyarakatan pertanian organik memerlukan strategi dengan cara memadukan beberapa komponen pertanian organik ke dalam teknologi konvensional yang sedang berjalan. Dalam implementasinya memungkinkan untuk penggunaan pupuk dan pestisida kimia sintetis, tetapi yang lebih diutamakan adalah mengoptimalkan pemanfaatan limbah organik demi menjaga kelestarian lahan dan lingkungan dalam jangka panjang, kualitas pangan dan kesehatan manusia.

5). Meningkatkan nilai jual produk melalui perbaikan penanganan pasca panen dan strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang ditempuh adalah memperbaiki pengemasan produk dan tetap menjual produk yang dihasilkan dengan harga pasar. Pemahaman yang diberikan adalah biaya usaha tani secara organik yang rendah sehingga meskipun dijual dengan harga pasar maka petani tetap memperoleh keuntungan. Hal ini dilakukan agar petani tidak selalu menuntut yang tinggi pada produk yang dihasilkan, karena hal tersebut dapat dicapai jika petani telah mempunyai sertifikat organik, padahal disisi lain biaya sertifikasi relatif mahal dan syarat prosedur sertifikasi yang ketat. Melalui pendekatan pemahaman keuntungan relatif lebih rendahnya biaya usaha tani secara organik diharapkan mampu memacu keinginan petani untuk beralih ke organik secara berkelanjutan.

Pemilihan konsep kawasan untuk pengembangan pertanian organik sesuai dengan hasil penelitian Putri (2010) yang menunjukkan perlunya suatu pilot pertanian organik di tiap daerah. Pilot ini dapat menjadi contoh bagi wilayah sekitar untuk berubah, karena karakteristik masyarakat petani adalah membutuhkan figur contoh. Pendekatan kawasan juga sesuai untuk kondisi masyarakat petani di Kota Batu yang luas kepemilikan lahannya rata-rata kecil. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Naik dan Nagadevara (2010) bahwa penerapan pola klaster/kawasan untuk pengembangan pertanian organik di India terbukti membantu dalam kontrol kualitas output yang lebih baik, mengurangi biaya sertifikasi dan memungkinkan petani dengan luas

lahan kecil untuk turut menerapkan pola pertanian organik.

Kondisi pada kawasan pertanian organik yang dibentuk di Kota Batu masih berfokus pada pembentukan sektor hulu yaitu penguatan produksi organik (*on farm*) dan belum melibatkan sektor lain yang terkait. Hal ini tidak sesuai dengan konsep kawasan pertanian organik yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian. Lebih lanjut Budiyanto (2011: 170) menjelaskan bahwa pola klaster mengkaitkan antara input-proses-output dan pasar secara terangkai yang berbasis pada suatu jenis komoditas pangan organik tertentu. Dengan demikian dalam suatu kawasan diharapkan terbentuk suatu pola keterpaduan dan memiliki keterkaitan dengan sektor industri hulu-hilir yang merupakan stimulan kegiatan ekonomi.

Konsep kawasan yang hanya menitikberatkan pembangunan pada satu sektor dikhawatirkan tidak dapat memenuhi tujuan dari pembentukan kawasan tersebut. Jika penguatan sektor hulu tidak diimbangi dengan penguatan sektor hilir pada saat bersama-sama maka kemungkinan keutuhan pengembangan tidak tercapai karena faktor yang menampung produksi dari sektor hulu belum siap, misalnya faktor pasar. Hal ini sesuai dengan penjelasan Tanjung dalam Budiyanto (2011: 170) bahwa tidak adanya keterkaitan antar sektor hulu dan hilir menyebabkan banyak lembaga usaha mikro, kecil dan menengah gagal beroperasi karena tidak mendapatkan kepastian terhadap penyediaan input dan pemasaran output. Disisi lain keterlibatan input, proses, output dan akses pasar sering tidak terorganisir secara benar, dan paket kebijakan pengembangan usaha masih bersifat sangat sektoral serta tidak terfokus pada satuan kelompok yang terangkai.

Selain itu pengembangan pertanian organik secara umum memerlukan dukungan dari segi administrasi terkait dengan regulasi, pedoman dan kelembagaan. Regulasi yang mengatur tentang kebijakan pengembangan pertanian organik masih bersifat umum, yaitu pada rencana pembangunan daerah Kota batu (RPJPD, RPJMD, Renstra Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu). Belum ada dokumen perencanaan, panduan dan regulasi yang bersifat khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pertanian organik. Kelembagaan yang menangani pertanian organik baik swasta maupun pemerintah juga belum banyak terbentuk sehingga upaya pengembangan masih berjalan secara parsial. Agar dapat berjalan secara

berkesinambungan maka upaya penerapan dan pengembangan pertanian organik memerlukan pengelolaan secara terpadu mulai dari tingkat pusat (nasional) hingga ke daerah (pemerintah kota/kabupaten), yang berarti memerlukan aturan/regulasi yang mampu mengatur secara tegas dan jelas hal-hal yang menjadi tugas serta kewenangan masing-masing level pemerintahan. Hal ini telah dilakukan oleh beberapa negara yang berkomitmen untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan pada agenda pembangunan di negaranya. Bahkan di Cina dibentuk lembaga independen dibawah kementerian untuk mewadahi aspirasi dan koordinasi lintas sektoral untuk menyelaraskan fungsi pembangunan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada intinya penerapan pembangunan berkelanjutan memerlukan keterpaduan dalam tiga hal, yaitu: 1) antar sektor pembangunan; 2) aktor/pelaksana; 3) kebijakan, komitmen dan pengawasan oleh berbagai level pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai di daerah (Breton, 2007: 433-532).

Stakeholder Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu

Pada bagian ini peneliti mengidentifikasi *stakeholder* yang memiliki hubungan dengan upaya pengembangan pertanian organik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya, serta mekanisme koordinasi yang terjalin.

Perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu berdasarkan hasil penelitian telah melibatkan beberapa pihak, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, maupun masyarakat. Masing-masing pihak yang terlibat memiliki peran tersendiri. Pihak akademisi/perguruan tinggi mempunyai peran untuk pemberian paket-paket teknologi sekaligus sebagai pihak konsultan ahli yang berwenang memberikan saran akademis terkait permasalahan teknis yang ditemui di lapangan. Peran pemerintah, yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu adalah sebagai fasilitator dengan tugas memfasilitasi kebutuhan petani berupa sarana produksi, dukungan infrastruktur, pendampingan dan transfer ilmu pengetahuan / teknologi pertanian organik melalui PPL/POPT, serta inisiator dalam perencanaan pertanian organik. Pihak swasta dalam hal ini praktisi / pengusaha organik dilibatkan sebagai konsultan dalam perencanaan. Sedangkan petani merupakan pihak penerima manfaat sekaligus pelaku utama dalam penerapan pertanian organik secara teknis di lapang.

Peran *stakeholders* yang terlibat dipandu melalui beberapa jalur koordinasi. Pada kegiatan pengembangan kawasan organik, pembagian peran diperjelas dengan dikeluarkannya SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan tentang tim pelaksana teknis kegiatan. Jika dikaji menggunakan konsep manajemen strategis yang menekankan pentingnya peran manajemen puncak dalam koordinasi, maka pengembangan kawasan pertanian organik di Kota Batu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) DPRD dan Walikota Batu menempati posisi sebagai dewan komisaris dengan peran mengarahkan dan memberi saran/petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada manajemen puncak melalui manajer puncak;

2) Kelompok manajemen puncak sebagai pengelola dan pelaksana kegiatan terdiri dari: a) Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai penanggung jawab; b) Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai ketua, c) Kabid. Teknologi Pengolahan Hasil dan Pemasaran sebagai wakil ketua; d) koordinator pelaksana lapangan dan anggotanya yang terdiri dari beberapa komponen *stakeholder*, yaitu PPL, POPT, ketua Gapoktan. Adapun manajer puncak dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan

3) Sesuai kedudukan dalam manajemen strategis tersebut, maka pihak DPRD mempunyai peran menyetujui, mengontrol, dan mengawasi kegiatan dalam hal persetujuan alokasi anggaran kegiatan, mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasinya melalui laporan pertanggungjawaban kegiatan yang disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan melalui laporan Walikota sebagai pelaksana pemerintahan tertinggi di daerah (Kota).

4) Dalam teknis perencanaan, kelompok manajemen puncak bersama pihak konsultan melakukan koordinasi untuk merumuskan rancangan kegiatan, dan menyamakan persepsi tentang maksud dan teknis pelaksanaan kegiatan. Agar dapat berjalan secara efektif maka Kepala Dinas selaku manajer puncak menetapkan SK tim pelaksana teknis kegiatan untuk memperjelas tugas dan kewajiban pihak-pihak yang dilibatkan. Selanjutnya dilakukan penjaringan dan penyesuaian dengan aspirasi *stakeholder* sasaran yaitu petani melalui pelaksanaan sosialisasi kegiatan. Aspirasi yang dituju terutama kesepakatan mengenai kesediaan petani, lokasi penanaman, komoditas yang ditanam, alokasi bantuan saprodi yang diperlukan.

5) Dalam teknis pelaksanaan, tim pelaksana lapangan terutama PPL dan POPT merupakan pihak yang paling banyak berhubungan dengan petani. Petani merupakan pihak utama sasaran kegiatan sebagai penerima manfaat dan pelaksana di lapang. PPL dan POPT menjalankan perannya untuk memberikan bimbingan/transfer teknologi, mendampingi petani dan kelompok tani selama kegiatan budidaya tanaman, serta tetap berkoordinasi dengan kelompok manajemen puncak terkait perkembangan maupun masalah yang ditemui di lapangan. Koordinasi dapat dilakukan secara informal melalui komunikasi personal maupun secara formal pada rapat-rapat koordinasi yang juga merupakan sarana untuk memonitor dan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh manajer puncak, yaitu kepala dinas. Adapun evaluasi secara khusus dilakukan melalui kerjasama dengan pihak akademisi setelah kegiatan pengembangan kawasan organik pada tahun 2011 selesai dilaksanakan.

Manajer puncak dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan memiliki posisi penting dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing personel/komponen *stakeholder* agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi kelancaran perencanaan dan pelaksanaan rencana. Hal ini diwujudkan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan potensi kemampuan personil, melakukan koordinasi/komunikasi dengan anggota tim maupun pihak lain yang dapat mendukung kelancaran kegiatan, menyetujui keputusan alokasi anggaran, serta membuat keputusan penting berdasarkan pertimbangan rasional. Namun demikian ada beberapa hal yang belum optimal dilakukan, misalnya belum dilakukan perencanaan strategis secara ideal, koordinasi bersifat sektoral pada bidang pertanian dan belum memberi dampak nyata bagi komitmen anggota tim. Dengan demikian manajer puncak masih belum optimal menangani tanggung jawab penting untuk manajemen strategis yang efektif sesuai pendapat Hunger dan Wheelen (2003: 43), meliputi: 1) memenuhi peran utama; 2) memberikan kepemimpinan eksekutif, 3) mengelola proses perencanaan strategis. Hal ini terkait pula dengan posisi manajer puncak yang dijabat oleh Kepala Dinas belum memiliki legitimasi yang kuat dalam membentuk komitmen tim. Pada akhirnya pelaksanaan kegiatan kurang maksimal yang salah satunya ditunjukkan dengan hanya beberapa pihak yang

aktif menjalankan perannya yaitu PPL di wilayah desa binaan.

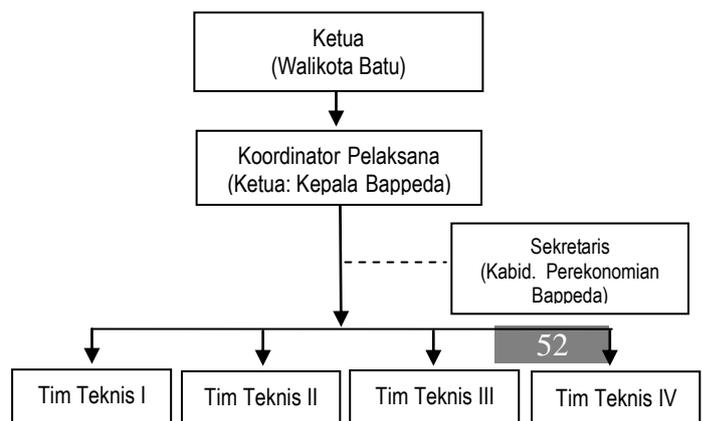
Berdasarkan beberapa kelemahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu dilakukan beberapa perbaikan. Pertama yaitu melakukan perencanaan pengembangan pertanian organik secara lintas sektoral. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat pengembangan pertanian organik bersifat kompleks. Dengan demikian koordinasi dilakukan dengan melibatkan SKPD pendukung, diantaranya Disperindag /UKM/koperasi, Dinas Kesehatan dll. Hal ini sesuai dengan pendapat Kartasmita (2997:61) bahwa koordinasi diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai sektor atau badan di berbagai daerah berjalan serasi dan menghasilkan sinergi. Agar tercipta sinergi antar *stakeholders* perlu dilakukan koordinasi secara sistematis dan terarah yang mana pada dasarnya hal tersebut merupakan langkah awal dari perencanaan strategis.

Koordinasi awal dilakukan di tingkat manajemen puncak, yaitu para pimpinan SKPD yang memiliki keterkaitan cukup besar dalam pengembangan pertanian organik. Inisiatif penyusunan rencana dapat berasal dari pimpinan Dinas Pertanian dan Kehutanan berkoordinasi dengan pimpinan Bappeda serta beberapa SKPD pendukung untuk melakukan koordinasi awal. Koordinasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan mengenai beberapa hal, yaitu: 1) pihak-pihak yang perlu dilibatkan; 2) maksud dilakukannya perencanaan pengembangan pertanian organik dan kesepakatan mengenai perlu atau tidak dilakukan perencanaan; 3) langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses penyusunan rencana, termasuk keanggotaan tim perencanaan pengembangan pertanian organik, misalnya perlunya pembentukan tim teknis/kelompok kerja; 4) pembagian peran sesuai kapasitas dan tupoksi masing-masing SKPD; 5) sumber daya yang diperlukan dan komitmen pengerahan sumber daya tersebut setiap *stakeholder* untuk mendukung pelaksanaan rencana. Kesepakatan yang dihasilkan selanjutnya disampaikan kepada Walikota sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memberi mandat sebagai dasar pelaksanaan perencanaan strategis, agar mendapat legitimasi, misalnya dengan penetapan SK tim teknis oleh Walikota. Dukungan Walikota sangat penting karena dengan adanya kepastian mandat yang diberikan oleh pihak eksekutif paling tinggi di daerah diharapkan mampu memunculkan komitmen

yang kuat bagi pelaksana serta memperjelas pembagian peran *stakeholders*.

Pada intinya tim teknis yang dibentuk hendaknya mewakili *stakeholders* terkait yaitu terdiri dari: 1) unsur pemerintah (SKPD terkait, baik di tingkat kepala SKPD, kepala bidang, kepala seksi, atau staf); 2) perwakilan masyarakat seperti tokoh masyarakat/ LSM/ gapoktan/praktisi organik; 3) perwakilan akademisi dari perguruan tinggi. Tim perencana yang terdiri dari berbagai unsur perwakilan *stakeholder* mempunyai maksud agar tim perencana mampu menganalisis dan merumuskan rencana dari sudut pandang yang beragam sesuai latar belakang masing-masing anggota, namun mengarah ke satu tujuan yaitu mewujudkan keberhasilan pengembangan pertanian organik di Kota Batu. Hal ini sesuai dengan pendapat Riyadi dan Dedy (2004: 10) bahwa pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam perencanaan bisa dari masyarakat umum, kalangan akademisi, tokoh-tokoh ormas, parpol dan elemen-elemen masyarakat lainnya yang dapat memberikan informasi penting tentang kebutuhan dasar pembangunan. Selanjutnya tim teknis yang terbentuk melakukan penjangkauan aspirasi *stakeholder* yang diperlukan untuk melakukan langkah-langkah perencanaan strategis selanjutnya yaitu perumusan tujuan, misi, analisis lingkungan (internal dan eksternal), identifikasi isu strategis, perumusan strategi dan merumuskan visi. Data dan informasi yang perlu dijaring dari *stakeholder* berkaitan dengan harapan, keluhan dan impian tentang kondisi pertanian organik yang akan dikembangkan. Proses perencanaan strategis yang dijelaskan tersebut mengacu pada langkah-langkah penyusunan rencana strategis oleh Bryson (2007: 55). Keterlibatan *stakeholder* dapat mengacu pada peran dan fungsi yang dijelaskan oleh Sutanto, sehingga gambaran keterlibatan dan peran *stakeholder* yang disarankan peneliti seperti disajikan pada Lampiran 1.

Sedangkan mekanisme koordinasi yang disarankan dalam pengembangan pertanian organik di Kota Batu ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme Koordinasi dalam Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu (Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2012)

Koordinator dari setiap posisi dalam mekanisme koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketua kegiatan adalah Kepala Daerah, yaitu Walikota Batu karena pengembangan pertanian organik melibatkan lintas sektoral. Ketua berwenang memberikan arahan penyelenggaraan tugas seluruh pelaksana
2. Koordinator pelaksana kegiatan, yaitu Kepala Bappeda Kota Batu sebagai instansi yang memiliki fungsi perencanaan Kota Batu, memiliki tugas antara lain: melakukan koordinasi dengan SKPD Kota Batu guna kelancaran pengembangan pertanian organik di Kota Batu; mengkoordinir keseluruhan kinerja, melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada ketua
3. Sekretaris, dijabat oleh Kepala Bidang Ekonomi Bappeda. Tugas sekretaris adalah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesekretariatan guna menunjang kelancaran kegiatan
4. Tim teknis informasi dan sosialisasi pertanian organik. Terdiri dari unsur Dinas Infokom, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Tim teknis peningkatan teknologi, SDM dan kelembagaan pertanian organik. Terdiri dari Dinas Pertanian dan Kehutanan, POPT, perguruan tinggi
6. Tim teknis peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil. Terdiri dari Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
7. Tim teknis promosi dan pengembangan pasar terdiri dari Disperindag UKM dan Koperasi, Dinas Pariwisata

Faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu

1. Faktor pendukung

Kondisi sumber daya alam Kota Batu mendukung dalam hal teknis pelaksanaan di lapang. Sebagai dataran tinggi memungkinkan

pengembangan tanaman sayur dataran tinggi yang mempunyai nilai ekonomis; banyaknya sumber mata air mendukung ketersediaan dan pemurnian air sebagai salah satu faktor utama dalam budidaya tanaman secara organik. Salah satu kearifan lokal masyarakat di Kota Batu adalah akrab dengan dunia pertanian. Hal ini memberi kemudahan dalam hal penyampaian informasi teknologi budidaya pertanian organik. Hal-hal teknis yang disampaikan melalui penyuluhan lebih mudah dipahami oleh petani, bahkan petani dapat berinovasi terhadap informasi yang diberikan.

Potensi ekonomi di Kota Batu seperti *image* Kota Batu sebagai kota wisata didukung produk hortikultura yang sudah dikenal sebagai produk unggulan Kota Batu menjadi salah satu faktor yang mampu mendukung pergerakan pertumbuhan ekonomi dalam hal pangsa pasar produk organik yang dihasilkan melalui pasar-pasar di daerah wisata yang ada di Kota Batu. Sosialisasi penerapan pertanian organik sekaligus promosi produk organik diperlancar oleh keterlibatan media massa baik cetak maupun elektronik. Disisi lain keberadaan perguruan tinggi yang terletak cukup dekat dengan Kota Batu membuka kesempatan kerjasama untuk perencanaan dan pendampingan teknologi pertanian organik. Sedangkan adanya regulasi atau peraturan nasional yang mengarah pada penerapan pertanian organik seperti UU No. 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, PP No. 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, UU No. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan menjadi motivasi dan dasar perencanaan pengembangan pertanian organik, termasuk di Kota Batu.

2. Faktor penghambat

Beberapa kendala terkait dengan penurunan hasil pada masa peralihan dari cara bertani konvensional menuju organik menjadi salah satu alasan bagi petani enggan menerapkan pola pertanian organik, apalagi jika kerugian tersebut ditanggung secara pribadi. Selain itu kendala sumber daya petani meliputi pola pikir bertani konvensional yang sangat kuat di kalangan petani, kurangnya pemahaman yang benar mengenai konsep dasar dan teknologi pertanian organik, serta perilaku yang lebih mengedepankan segi ekonomis. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tandisau dan Herniwati (2009: 237-238) bahwa sikap petani selama ini dinobatkan oleh cara pertanian yang relatif serba cepat dan mudah sehingga

menjadi tantangan tersendiri untuk dapat merubah kembali menjadi petani yang tekun, sabar dan mau bekerja keras. bekerja keras.

Selain itu ditemui pula kendala dari segi administrasi. Perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu tidak didukung oleh dokumen rencana teknis atau rencana operasional, dan seringkali pergantian pimpinan /mutasi pejabat struktural menyebabkan ketidakjelasan keberlangsungan rencana. Selain itu berkaitan dengan SK tim pelaksana teknis kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas ternyata belum cukup kuat untuk memberikan komitmen bagi anggota tim pelaksana. Tidak adanya anggaran operasional kegiatan tim pelaksana teknis juga menyebabkan anggota tim kurang termotivasi untuk menjalankan tugas sesuai SK yang ditetapkan. Dengan demikian perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu dalam hal anggaran belum memenuhi pendapat Riyadi dan Deddy (2004: 39) bahwa perencanaan pembangunan harus sudah memperhitungkan masalah pendanaan mulai dari jumlah yang dibutuhkan, sumber pendanaan, dan bagaimana sistem pengelolaan-nya. Hal ini penting demi efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. a. Pemahaman yang baik terhadap kondisi wilayah perencanaan (masalah dan potensi) menjadi modal dasar dalam tujuan rencana pembangunan dan dasar penentuan strategi. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan berusaha memahami kondisi pertanian di Kota Batu dengan cara mengamati realitas permasalahan pertanian yang terjadi melalui peran serta PPL; memperjelas kondisi masalah melalui pelaksanaan kegiatan penelitian/pengujian terhadap beberapa masalah utama seperti status kesuburan tanah serta tingkat residu pestisida pada tanah dan produk pertanian; melakukan analisis data statistik pertanian.
- b. Secara keseluruhan perencanaan pengembangan pertanian organik yang dilakukan mengarah pada tiga tahap fase pembangunan, yaitu fase jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Namun belum ada rentang waktu yang pasti tentang upaya pencapaian masing-masing tahap.
- c. Perencanaan pengembangan pertanian organik di Kota Batu dilakukan melalui pendekatan-

an perencanaan secara politis, teknokratis, partisipasi serta *top down* dan *bottom up*.

2. Beberapa konsep pemikiran dalam strategi pengembangan kawasan pertanian organik di Kota Batu ditujukan untuk mengarahkan petani supaya mampu melanjutkan penerapan pertanian organik secara mandiri. Namun masih ada kelemahan pada kawasan yang dibentuk, yaitu masih difokuskan pada penguatan sektor hulu (produksi) saja, belum terintegrasi dengan sektor lain. Kerjasama dengan pemerintah daerah lain juga belum dilakukan.
3. Pengembangan pertanian organik perlu melibatkan berbagai *stakeholder* untuk menjamin komitmen dan kerjasama antar sektor serta antar *stakeholder*. Pemerintah Kota Batu telah berupaya melibatkan beberapa *stakeholder* terkait seperti akademisi, petani dan praktisi, namun masih belum mencakup keseluruhan *stakeholder* yang seharusnya dilibatkan, terutama SKPD terkait dan pihak swasta. Hal ini disebabkan orientasi pengembangan kawasan yang masih bersifat sektoral.
4. a. Faktor pendukung: dukungan SDA Kota Batu; potensi ekonomi, dukungan media massa, lokasi perguruan tinggi yang cukup dekat dari Kota Batu, peraturan nasional yang mendukung penerapan pertanian organik.
b. Faktor penghambat: kendala teknis di lapangan; kendala sumber daya terutama pola pikir petani yang cenderung konvensional; kendala administrasi yaitu tidak ada dokumen rencana teknis, kurangnya koordinasi, tidak ada penganggaran honorarium tim pelaksana teknis pada kegiatan pengembangan kawasan pertanian organik.

Saran

1. Perlu melakukan perencanaan yang disusun secara lebih cermat, holistik, dengan memperhitungkan kebutuhan biaya, waktu pencapaian target, dan indikator keberhasilan yang terukur dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mendukung maupun menghambat perencanaan. Rencana yang dibuat hendaknya diwujudkan dalam suatu dokumen perencanaan dan ditetapkan secara legal. Komponen pendukung operasional perencanaan, misalnya tim pelaksana kegiatan hendaknya ditetapkan oleh SK Walikota sehingga mampu meningkatkan komitmen anggota untuk melaksanakannya.

2. Melanjutkan kegiatan pengembangan pada kawasan organik yang sudah dibentuk dengan fokus memperkuat motivasi petani yang telah muncul, pendampingan petani kearah kemandirian dan merintis pemasaran. Hal ini dapat ditempuh melalui sosialisasi, pendampingan secara kontinyu dan peningkatan partisipasi petani dalam penyusunan rencana dan pelaksanaannya.
3. Dalam pertanian organik orientasi ekonomi bukan satu-satunya tujuan yang ingin dicapai, namun sebagai satu kesatuan dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah, sektor ekonomi tetap perlu diperhatikan. Beberapa alternatif pemasaran produk organik yang dapat dipertimbangkan yaitu:
 - a) Mempertimbangkan pola kemitraan dengan pengusaha/pelaku organik yang sudah memiliki pasar. Dalam hal ini pemerintah perlu memfasilitasi sebagai penghubung dan merintis kemitraan dengan pengusaha, koperasi, dll.
 - b) Pasar juga dapat dibentuk melalui promosi desa wisata yang memungkinkan menarik pengunjung ke lokasi kawasan organik. Hal ini cukup menguntungkan karena meskipun belum mendapat sertifikat organik, kepercayaan konsumen sudah dapat dibentuk melalui pengamatan langsung oleh pengunjung tentang kegiatan budidaya tanaman organik di lokasi.
4. Koordinasi antar *stakeholder* akan lebih efektif apabila melibatkan pihak manajemen puncak di tingkat pemerintahan Kota, meliputi Walikota dan para pimpinan SKPD terkait, serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Tim Pelaksana Pengembangan Pertanian Organik oleh Walikota.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Lily, et al., (eds). 2002. "Memasyarakatkan Pertanian Organik Sebagai Jembatan Menuju Pembangunan Pertanian Berkelanjutan". *Prosiding Lokakarya Nasional Pertanian Organik : Memasyarakatkan Pertanian Organik Sebagai Jembatan Menuju Pembangunan Pertanian Berkelanjutan*. Universitas Brawijaya, 7-9 Oktober 2002.
- Budiyanto, M. Agus Krisno. 2011. "Optimasi Pengembangan Kelembagaan Industri Pangan Organik di Jawa Timur". *Jurnal Teknik Industri*. Vol. 12. No. 2. Hal. 169-176.
- Breton, Albert. et al., (eds). 2007. *Environmental Governance and Decentralization*. Massachusetts: Edward Elgaer Published.
- Conyers, Diana and Peter Hills. 1990. *An Introduction to Development Planning in the Third World*, Scotland: C.R. Barber & Partners.
- Faludi, Andreas. 1976. *Planning Theory*. New York: Pergamon Press.
- Hunger, J. David dan Thomas L. Wheelen. 2003. *Manajemen Strategis*. Penerjemah: Julianto Agung. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Iryanto. 2006. "Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Melalui Pendekatan Wilayah dan Kerjasama Antar Daerah". *Wahana Hijau: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Vo. 1. No. 3. Hal. 95-102.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang)*. Erlanga, Jakarta.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Penerjemah Tjejep Rohendi R. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Naik, Gopal dan Vishnuprasad Nagadevara. 2010. "Spatial Clusters in Organic Farming (A Case Study of Pulses Cultivation in Karnataka)". *Indian Institute of Management Bangalore*. Hal. 1-19.
- Prihandarini, Ririen. 2002. "Sosialisasi Pembinaan Pertanian Organik Melalui Network MAPORINA". *Prosiding Lokakarya Nasional Pertanian Organik: Memasyarakatkan Pertanian Organik Sebagai Jembatan Menuju Pembangunan Pertanian Berkelanjutan*. Universitas Brawijaya, 7-9 Oktober 2002. Hal. 61-67.
- Putri, Fitriana S. 2010. *Pengembangan Panduan Penerapan Sustainable Agriculture di Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah*. Tesis. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
- Riyadi dan Dedi Supriadi Bratakusumah, 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan*

- Otonomi Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Salikin, Karwan A. 2003. *Sistem Pertanian Berkelanjutan*. Yog-yakarta: Kanisius
- Sutanto, Rachman. 2006. *Pertanian Organik: Menuju Pertanian Alternatif dan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Cetakan ketujuh belas. Jakarta: LP3ES.
- Lampiran

Stakeholder dalam Perencanaan Pengembangan Pertanian Organik

No.	Stakeholder	Rincian	Peran
1.	Pemerintah Daerah	Walikota Batu	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kebijakan pendukung perencanaan pengembangan pertanian organik (perda), meliputi SK Tim Teknis, SK Kawasan sert kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan - Mendorong komitmen pelaksanaan kegiatan
		Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu	<ul style="list-style-type: none"> - Inisiator dalam pengembangan pertanian menuju organik - Memfasilitasi sarana produksi pertanian organik - Pendampingan dan transfer teknologi pertanian organik
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu merintis jaringan pemasaran - Pelatihan kewirausahaan
		Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi kesehatan masyarakat, terutama mengenai pangan yang aman dan sehat
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan penyebaran konsep, teknologi pertanian organik secara formal dalam materi kurikulum pendidikan - Pendidikan wirausaha pertanian
		Dinas Cipta Karya	Perbaikan infrastruktur umum (jalan, fasilitas umum)
		Aparat desa dan kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu koordinasi program kegiatan dari SKPD dengan masyarakat - Memberi motivasi melalui keterlibatan/aktif secara fisik dalam kegiatan bersama masyarakat
2.	Akademisi	Fakultas Pertanian Universitas Baruwijaya	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai konsultan ahli yang bertugas memberikan saran-saran akademis terkait permasalahan teknis yang ditemui di lapangan - Memberikan paket-paket teknologi - Melakukan penelitian teknologi organik
3.	Masyarakat	Petani, anggota kelompok tani	Pelaksana aplikasi teknologi pertanian organik di lapangan
		Ketua kelompok tani, ketua gapoktan, pemuka masyarakat	Mendorong keaktifan anggota kelompok tani dan memupuk semangat petani
4.	Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - DPRD - LSM organik / peduli lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan pemerintah dan LSM dalam menentukan kebijakan yang diperlukan untuk memperlancar pengembangan pertanian organik - Berkoordinasi dengan pemerintah dan DPRD dalam menentukan kebijakan yang diperlukan untuk memperlancar pengembangan pertanian organik - Pendampingan petani - Pengawasan kegiatan oleh masyarakat dan

No.	Stakeholder	Rincian	Peran
			masyarakat

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2012